

PENDIDIKAN KEBUTUHAN KHUSUS

Zaenal Alimin
Prodi Pendidikan Kebutuhan Khusus SPS UPI
Jurusan PLB FIP UPI
Email: alimin@upi.edu

A. Pendahuluan

Saat ini sedang terjadi proses transformasi pemikiran dari konsep pendidikan khusus/PLB (*special education*) ke konsep pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*). Terdapat perbedaan orientasi antara pendidikan khusus/PLB dengan pendidikan kebutuhan khusus. Konsep pendidikan kebutuhan khusus saat ini dipandang sebagai sebuah pemikiran yang bersifat holistik, anak dipandang sebagai individu yang utuh, setiap anak memiliki hambatan untuk berkembang dan hambatan dalam belajar yang bervariasi. Oleh karena itu menurut paham ini pembelajaran seharusnya perpusat pada anak untuk membantu menghilangkan hambatan belajar dan hambatan perkembangan, sehingga kebutuhan belajar setiap anak dapat dipenuhi.

Konsep yang sangat ideal seperti itu mendapat respon positif dari semua kalangan, ada usaha-usaha para praktisi pendidikan di lapangan mulai mencoba mempraktekan prinsip-prinsip pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan setiap anak. Namun demikian konsep tentang pendidikan kebutuhan khusus dan inklusi harus secara terus menerus diperkenalkan kepada para pendidik dan calon pendidik, agar pemahaman tentang pendidikan inklusif semakin dipahami dan diterima.

Pada bab ini dijelaskan perbedaan paradigma pendidikan khusus/PLB (*special education*) dengan paradigma pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*), diharapkan para pembaca terutama mahasiswa calon guru mendapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang dasar pemikiran yang berada dibelakang paradigma pendidikan kebutuhan khusus. Pada gilirannya diharapkan para pembaca memiliki pendirian bahwa setiap anak itu beragam, keragaman itu sebuah kenyataan yang harus

diterima dan dikelola dalam pembelajaran. Selain itu para pembaca -mahasiswa calon guru- diharapkan tidak lagi berpikir bahwa anak-anak di dalam kelas itu homogen dan diperlakukan dengan cara yang sama.

B. Perubahan Paradigma : Dari Pendidikan Khusus (*Special Education*) Ke Pendidikan Kebutuhan Khusus (*Special Needs Education*)

1. Paradigma Pendidikan Khusus/PLB (*Special Education*)

Perkembangan sejarah pendidikan bagi anak penyandang cacat yang yang disebut Pendidikan Luar Biasa (sebagai terjemahan dari *Special Education*), selama beberapa dekade telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu dipengaruhi oleh sikap dan kesadaran masyarakat terhadap anak penyandang cacat dan pendidikannya, metodologi dan perubahan konsep yang digunakan.

Sejarah menunjukkan bahwa selama berabad abab di semua Negara di dunia, individu yang keadaannya berbeda dari kebanyakan individu pada umumnya (menyandang kecacatan), kehadirannya ditolak oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan anggota kelompok yang terlalu lemah (penyandang cacat) tidak mungkin dapat berkontribusi terhadap kelompoknya. Mereka yang berbeda karena menyandang kecacatan disingkirkan, tidak mendapatkan kasih sayang dan kontak sosial yang bermakna, keberadaan penyandang cacat tidak diakui oleh masyarakatnya.

Di masa lalu, ketidaktahuan orang tua dan masyarakat mengenai hakekat dan penyebab kecacatan menimbulkan rasa takut dan perasaan bersalah, sehingga berkembang macam-macam kepercayaan dan tahayul. Misalnya seorang ibu yang melahirkan anak penyandanc cacat merupakan hukuman baginya atas dosa-dosa nenek moyangnya. Oleh sebab itu di masa lalu, anak-anak penyandang cacat sering disembunyikan oleh orang tuanya, sebab memiliki anak penyandang cacat merupakan aib keluarga.

Peradaban manusia terus berkembang, pemahaman dan pengetahuan baru mengajarkan kepada manusia bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup. Pandangan seperti inilah yang berhasil menyelamatkan kehidupan anak-anak penyandang cacat. Menyelatkan hidup anak-anak penyandang cacat menjadi penting karena dipandang sebagai symbol dari sebuah peradaban yang lebih maju dari sari suatu bangsa,

meskipun anak-anak penyandang cacat memerlukan perhatian ekstra (Miriam, 2001). Pandangan orang tua dan masyarakat yang menganggap bahwa memelihara dan membesarkan anak merupakan investasi agar kelak anak dapat membalas jasa orang tuanya menjadi tidak dominan.

Anak penyandang cacat mulai diakui keberadaannya, dan oleh sebab itu mulai berdiri sekolah-sekolah khusus, rumah-rumah perawatan, dan panti social yang secara khusus mendidik dan merawat anak penyandang cacat. Mereka yang menyandang kecacatan dipandang memiliki karakteristik yang berbeda dari orang kebanyakan, sehingga dalam pendidikannya mereka memerlukan pendekatan dan metode khusus sesuai dengan karakteristiknya. Oleh sebab itu pendidikan anak-anak penyandang cacat harus dipisahkan (di sekolah khusus) dari pendidikan anak-anak lainnya. Konsep pendidikan seperti inilah yang disebut dengan *Special Education* (di Indonesia diterjemahkan menjadi Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus), yang melahirkan system sekolah segregasi (Sekolah Luar Biasa).

Di dalam konsep *special education* (PLB/Pendidikan Khusus) dan dalam sistem pendidikan segregasi, anak penyandang cacat dilihat dari aspek karakteristik kecacatannya (*labeling*), sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan, sehingga setiap kecacatan harus diberikan layanan pendidikan yang khusus yang berbeda dari kecacatan lainnya (dalam prakteknya terdapat sekolah khusus/ Sekolah Luar Biasa untuk anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa). Layanan yang terpisah dari pendidikan biasa. pendidikan seperti ini disebut dengan sistem pendidikan segregasi. Oleh karena itu terdapat dikotomi antara pendidikan khusus/Pendidikan Luar Biasa/ Sekolah Luar Biasa dengan pendidikan biasa/ sekolah biasa, dianggap dua hal yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain fokus utama dari *Special Education/ PLB* adalah label kecacatan bukan anak sebagai individu yang unik.

Dalam paradigma pendidikan khusus/PLB (*special education*) melahirkan layanan pendidikan yang bersifat segregasi dan layanan pendidikan integrasi. Layanan pendidikan segregasi yaitu layanan pendidikan yang diberikan pada satu jenis kecacatan tertentu dalam bentuk sekolah khusus seperti sekolah khusus untuk anak tunanetra, sekolah khusus untuk anak tunarungu, dst. Sementara itu, layanan pendidikan yang

dianggap lebih maju yaitu anak-anak yang menyandang kecacatan layanan pendidikannya di satukan dengan anak bukan penyandang cacat di sekolah biasa, dengan syarat anak-anak penyandang cacat dapat diterima di sekolah biasa apabila dapat mengikuti ketentuan yang berlaku bagi anak-anak bukan penyandang cacat.

a. Konsep Pendidikan Segregasi

Perkembangan sejarah pendidikan bagi penyandang cacat selama beberapa dekade telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu terjadi dalam hal kesadaran dan sikap masyarakat terhadap anak penyandang cacat dan perubahan dalam konsep yang digunakan. Sejarah menunjukkan pula bahwa selama-berabad-abad di kebanyakan negara di dunia, individu yang berbeda atau menyimpang dari kebanyakan dianggap sebagai yang tidak normal dan kehadirannya selalu ditolak oleh masyarakat dan lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa anggota kelompok yang lemah (cacat) tidak mungkin dapat berkontribusi. Mereka yang berbeda karena menyandang kecacatan disingkirkan dan tidak memperoleh kasih sayang dan kontak sosial yang bermakna. Pada waktu itu keberadaan individu penyandang cacat tidak diakui keradaannya oleh masyarakat.

Ketidaktahuan masyarakat tentang hakekat dan penyebab kecacatan menimbulkan rasa takut, sehingga berkembang macam-macam kepercayaan dan tahayul. Misalnya seorang ibu yang melahirkan anak penyandang cacat dianggap sebagai hukuman atau kutukan bagi atas dosa-dosa nenek moyangnya. Oleh sebab itu di masa lalu anak-anak penyandang cacat sering disembunyikan oleh orang tuanya, sebab mempunyai anak penyandang cacat dianggap sebagai aib keluarga.

Peradaban manusia terus berkembang, pemahaman dan pengetahuan baru mengajarkan kepada manusia bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup. Pandangan seperti inilah yang berhasil menyelamatkan kehidupan anak-anak penyandang cacat. Menyelamatkan hidup anak penyandang cacat menjadi penting karena dipandang sebagai symbol dari sebuah peradaban yang lebih maju (Miraiam, 2001). Pandangan orang tua dan masyarakat yang menganggap bahwa memelihara, membesarkan dan

mendidik anak-anak penyandang cacat merupakan *investasi* agar kelak anak membalas jasa orang tuanya menjadi tidak dominan.

Anak penyandang cacat mulai diakui keberadaannya dan oleh sebab itu mulai berdiri sekolah-sekolah khusus, rumah-rumah perawatan, panti-panti sosial yang secara khusus mendidik dan merawat anak-anak penyandang cacat. Mereka yang menyandang kecacatan dianggap memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dari orang kebanyakan (*normal*), Sehingga dalam pendidikannya mereka memerlukan pendekatan dan metoda yang sangat khusus sesuai dengan karakteristinya. Oleh karena itu pendidikan bagi anak penyandang cacat harus dipisahkan (di sekolah khusus) dari anak *normal*.

Berdasarkan alasan seperti itu munculah sekolah-sekolah khusus sesuai dengan label kecacatan, seperti sekolah khusus bagi anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, kecerdasan, dan bagi anak-anak yang mengalami gangguan gerak/motorik. Perkembangan berdirinya sekolah-sekolah khusus yang terpisah didasarkan oleh adanya anggapan (konsep) bahwa seorang anak yang mengalami kecacatan tertentu akan memperoleh banyak keuntungan dari pendidikan yang terpisah dari anak *normal* karena sangat memungkinkan mereka belajar dalam kelas dengan jumlah murid yang sedikit, belajar bersama guru yang sangat spesialis dengan menggunakan pendekatan, metoda, program dan alat-alat yang sangat khusus. Konsep pendidikan seperti ini yang disebut dengan system pendidikan *segregasi*, yaitu pendidikan khusus yang terpisah dari pendidikan anak normal. Sistem pendidikan segregasi dilandasi oleh konsep *special education*.

Di Indonesia system pendidikan integrasi sudah berlangsung satu abad lebih, sejak dimulainya pendidikan bagi anak tunanetra pada tahun 1901 Bandung. Dalam konsep *special education* dan system pendidikan segregasi lebih melihat anak dari label dan karakteristik kecacatannya sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan. Oleh karena itu terjadi dikotomi antara pendidikan anak cacat di sekolah khusus (*segregasi*) dengan sekolah biasa. Pendidikan khusus dan sekolah khusus dipandang sebagai hal yang sangat berbeda dari sekolah biasa, yang seolah-olah terdapat dua system pendidikan yang saling berlawanan.

Sistem pendidikan *segregasi* yang sampai saat ini di Indonesia eksistensinya masih sangat kuat, mengandung kelemahan-kelemahan baik bagi anak-anak penyandang cacat itu sendiri maupun bagi orang tua dan masyarakat pada umumnya. Secara pedagogis, system pendidikan segregasi mengabaikan eksistensi anak sebagai individu yang unik dan holistic, sementara itu kecacatan anak lebih ditonjolkan. Secara psikologis, system segregasi kurang memperhatikan hambatan belajar, perbedaan individual dan kebutuhan anak. Ada kesan menyeragamkan layanan pendidikan berdasarkan kecacatan yang disandangnya. Secara filosofis pendidikan segregasi menciptakan dikotomi masyarakat eksklusif normal dan tidak normal. Padahal sesungguhnya penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat (Smith, 1995).

Dari sudut pandang penelitian, tidak ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa sekolah khusus yang terpisah (*segregasi*) lebih baik dalam hal hasil belajar anak baik secara akademik maupun sosial dibandingkan dengan sekolah integrasi (Center & Cury, 1993).

b. Pendidikan Integrasi

Pemahaman konsep tentang pendidikan anak penyandang cacat terus berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun delapan puluhan terjadi gerakan yang kuat terhadap penyatuan pendidikan anak penyandang cacat bersama-sama dengan anak pada umumnya di sekolah biasa yang disebut dengan integrasi. Integrasi adalah penyediaan pendidikan yang berkualitas bagi siswa-siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah biasa.

Dalam system pendidikan integrasi anak-anak penyandang cacat mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah biasa bersama anak-anak pada umumnya. Akan tetapi kesempatan bagi anak penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan di sekolah biasa dibatasi oleh adanya patokan yaitu bahwa anak penyandang cacat dapat diterima di sekolah reguler sepanjang anak ini dapat menyesuaikan diri dengan system yang berlaku bagi anak pada umumnya. Artinya anak penyandang cacat harus mampu menyesuaikan diri dengan system yang ada di sekolah itu.

Istilah integrasi digunakan sebagai kata benda dalam menggambarkan usaha-usaha untuk menghindari pemisahan dan isolasi pendidikan anak-anak penyandang cacat. Di dalam deskripsi dari usaha-usaha integrasi tercermin makna organisasi yang terstruktur dan mempunyai karakteristik yang khas. Di dalam sebuah studi tentang integrasi (Lucas, 1981), menjelaskan bahwa organisasi pendidikan integrasi sebagai berikut:

a. Sekolah reguler dan kelas reguler tanpa dukungan

Dalam organisasi ini anak penyandang cacat secara penuh berada di kelas dan sekolah reguler. Layanan pendidikan yang diperoleh oleh anak penyandang cacat sama seperti yang diperoleh oleh anak pada umumnya. Artinya anak penyandang cacat harus mengikuti standar yang berlaku bagi anak bukan penyandang cacat dalam hal kurikulum, evaluasi, dan dalam penggunaan fasilitas.

b. Kelas reguler ada dukungan untuk guru dan siswa

Dalam organisasi seperti ini anak penyandang cacat yang belajar di sekolah reguler memperoleh dukungan dalam hal-hal tertentu yang tidak mungkin diperoleh secara bersama dengan yang bukan penyandang cacat. Misalnya seorang anak tunanetra memperoleh dukungan ketika mengerjakan soal ujian, ada orang lain yang membacakan soal-soal untuk dijawab. Demikian juga guru mendapat dukungan dari guru khusus ketika harus memeriksa hasil ujian yang ditulis dalam tulisan braille.

c. Kelas reguler *full out support*

Organisasi *integrasi full out support* adalah anak penyandang cacat yang belajar di sekolah reguler pada waktu-waktu tertentu dapat ditarik keluar dari kelas untuk belajar bidang pelajaran tertentu yang dilakukan di tempat khusus (ruang sumber). Setelah itu kembali lagi ke kelas reguler.

d.1. Kelas reguler sebagai basis, kelas khusus paruh waktu

Dalam organisasi ini seorang anak penyandang cacat sebagai anggota dari kelas reguler di sekolah reguler, akan tetapi ketika anak ini memerlukan layanan yang bersifat khusus pergi ke kelas khusus yang ada di sekolah itu. Artinya separuh waktu belajar

berada di kelas reguler dan separuh lagi berada di kelas khusus, tetapi basisnya tetap kelas reguler.

d.2 Kelas khusus sebagai basis, kelas reguler paruh waktu

Organisasi integrasi ini kebalikan dari organisasi dari (d.1), dimana anak penyandang cacat merupakan anggota dari kelas khusus yang ada di sekolah reguler, tetapi sebagian dari waktu belajarnya dapat dilakukan di kelas reguler bersama dengan anak lainnya.

e. Kelas khusus penuh

Anak penyandang cacat secara penuh belajar di kelas khusus yang berada di sekolah reguler. Mereka hanya secara fisik berada di sekolah reguler, tetapi mereka tidak terlibat dalam aktifitas belajar yang dilakukan bersama dengan anak lainnya, meskipun mereka berada pada lokasi (sekolah) yang sama.

f. Sekolah khusus paruh waktu, sekolah reguler paruh waktu

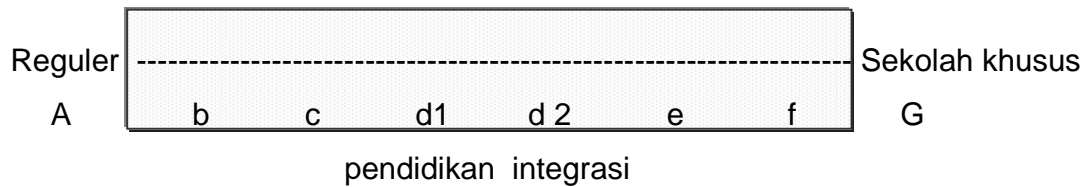
Organisasi integrasi seperti ini dilakukan melalui kerja sama antara sekolah khusus dengan sekolah reguler. Seorang anak penyandang cacat bersekolah di sekolah khusus, tetapi pada waktu-waktu tertentu anak ini bisa berada di sekolah reguler untuk belajar bidang tertentu bersama-sama dengan anak lainnya.

g. Sekolah khusus penuh

Sekolah ini adalah sekolah yang secara khusus diperuntukan bagi anak penyandang cacat tertentu. Misalnya sekolah khusus bagi anak yang mengalami tunanetra, sekolah khusus bagi anak yang mengalami tunarungu, sekolah khusus bagi anak yang mengalami tunagrahita, dan sekolah khusus bagi anak yang mengalami tunadaksa. Sekolah seperti ini disebut dengan istilah *segregasi*.

Sangat jelas bahwa pendidikan integrasi melibatkan banyak perubahan baik di dalam maupun di luar sekolah. Sebagai contoh perubahan sikap guru terhadap anak penyandang cacat yang ada di masyarakat, diperlukan perubahan system pendanaan, modifikasi bangunan sekolah, fasilitas transportasi, organisasi dan kegiatan masyarakat

yang harus bermuara kepada kesejahteraan bersama. Organisasi pendidikan integrasi yang dijelaskan di atas, secara visual dapat digambarkan pada bagan 1.3 sebagai berikut:



Bagan 1.3 Organisasi Program Pendidikan Integrasi (Lucas, 1981)

2. Paradigma Pendidikan Kebutuhan Khusus (*Special Needs Education*)

Dalam konsep pendidikan kebutuhan khusus semua anak termasuk anak penyandang cacat dipandang sebagai individu yang unik. Setiap individu anak memiliki perbedaan dalam perkembangan dan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda pula. Anak-anak penyandang cacat memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar akibat dari kecacatan yang dimilinya. Oleh karena itu fokus utama dari pendidikan kebutuhan khusus adalah hambatan belajar dan kebutuhan anak secara individual (Miriam, 2001). Pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*) memandang anak termasuk anak penyandang cacat sebagai individu yang khas dan utuh, keragaman dan perbedaan individu sangat dihormati.

Konsep pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*) melihat kebutuhan anak dari spektrum yang sangat luas, yaitu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang bersifat khusus, oleh karena itu anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (*temporary special needs*) dan anak kebutuhan khusus yang bersifat menetap (*permanently special needs*).

Anak berkebutuhan khusus temporer/sementra (*temporary special needs*) adalah anak-anak yang mengalami hambatan akibat dari faktor-faktor lingkungan seperti: (1) anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat sering menerima kekerasan dalam rumah tangga, (2) mengalami kesulitan konsentrasi karena sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya, (3) mengalami kesulitan kumulatif dalam membaca dan berhitung akibat kekeliruan guru dalam mengajar atau (4) anak-anak yang mengalami trauma akibat dari bencana alam yang mereka alami. Anak-anak seperti ini memerlukan

bantuan khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialaminya. Apabila mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, tidak mustahil hambatan-hambatan tersebut akan menjadi permanent.

Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen (*permanently special needs*) adalah anak-anak yang mengalami hambatan dan kebutuhan khusus akibat dari kecacatan tertentu, misalnya kebutuhan khusus akibat dari kehilangan fungsi penglihatan, kehilangan fungsi pendengaran, perkembangan kecerdasan/kognitif yang rendah, gangguan fungsi gerak/motorik dsb.

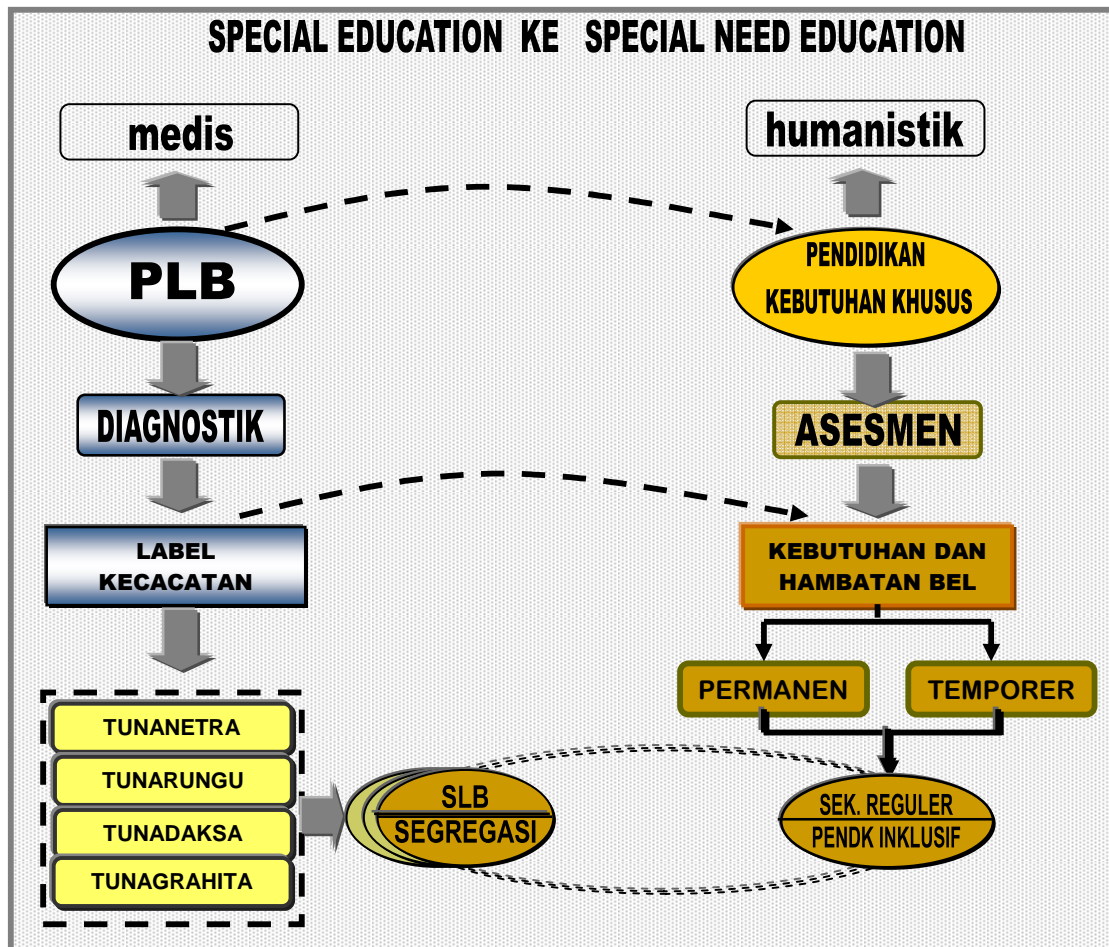
Anak berkebutuhan khusus baik yang bersifat temporer maupun yang bersifat permanen memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan-kebutuhannya. Bidang studi yang membahas tentang penyesuaian pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan kebutuhan khusus (*Special Needs Education*). Oleh sebab itu cakupan wilayah pendidikan kebutuhan khusus menjadi sangat luas karena tidak dianalogikan dengan lokasi atau tempat layanan yang bersifat khusus (sekolah khusus/sekolah luar biasa seperti pada konsep pendidikan khusus/PLB (*special education*), tetapi lebih bersifat fungsional yaitu layanan pendidikan bagi semua anak yang membutuhkan layanan khusus akan pendidikan (*special educational needs*) di manapun mereka berada baik di sekolah biasa, di sekolah khusus, di rumah (*home schooling*), di rumah sakit (bagi anak yang rawat inap sangat lama dan meninggalkan sekolah), maupun mungkin di lembaga-lembaga perawatan anak. Anak-anak dengan diagnosis yang sama (misalnya : tunanetra atau tunagrahita), dalam paradigma pendidikan khusus/luar biasa dilayani dengan cara yang sama berdasarkan berdasarkan label kecacatannya. Sekarang disadari bahwa anak dengan diagnosis medis yang sama ternyata dapat belajar dengan cara yang jauh berbeda. Dengan kata lain, mereka dapat mempunyai kebutuhan pendidikan (*special educational needs*) yang berbeda-beda (Miriam, 2001).

Diagnosis seperti yang dilakukan pada masa lalu menyebabkan anak-anak diberi label ketunaan yang mengakibatkan gurunya memfokuskan aktivitas layanan pendidikan pada keterbatasan yang disebabkan oleh kecacatannya. Ini mengakibatkan guru tidak menyadari potensi yang ada pada diri anak. Pemberian label dan layanan pendidikan

yang terlalu dispesialisasikan menyebabkan banyak guru khusus kehilangan pemahaman yang *holistic* tentang anak dan, tidak menggunakan pendekatan *holistic* dalam pembelajaran. Ini mengakibatkan timbulnya *anemia* pendidikan dan menghambat pengayaan

Perlu dipahami perbedaan istilah pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*) dengan istilah kebutuhan khusus akan pendidikan (*special educational needs*). Seperti telah disebut sebelumnya bahwa pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*) adalah disiplin ilmu yang membahas tentang layanan pendidikan yang disesuaikan bagi semua anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu baik yang bersifat temporer maupun yang bersifat permanen. Sementara itu istilah kebutuhan khusus akan pendidikan (*special educational needs*) adalah kebutuhan, hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh seorang anak secara individual.

Sejauh ini telah terjadi pergeseran atau pergerakan dalam cara berpikir dari pemahaman yang didasarkan pada pengelompokkan anak menurut identitas atau label kecacatan tertentu menuju ke arah pemahaman anak secara holistik dan melihat anak sebagai individu yang unik. Untuk melihat proses pergeseran cara pandang seperti itu dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini.



Bagan 1.1: Pergerakan Dari Pendidikan Kusus/PLB ke Pendidikan Kebutuhan Khusus

Paradigma pendidikan kebutuhan khusus melihat individu anak dari sudut pandang yang lebih holistik yaitu melihat anak dari kebutuhan, hambatan belajar dan hambatan perkembangannya secara individual bukan dari label kecacatan yang dialami. Konsekuensi dari cara pandang ini melahirkan gagasan bahwa anak-anak penyandang cacat seharusnya dilayani pendidikannya bersama-sama dengan pada umumnya di sekolah biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Layanan pendidikan seperti dinamakan pendidikan inklusif yang bersifat responsive dan disesuaikan. Hal ini dirumuskan dalam Forum Pendidikan Dunia di Dakar (Dakar *World Education Forum*, April 2000). Rumusan akhir dari forum itu adalah: Tantangan utama yang dihadapi adalah menjamin visi pendidikan untuk semua yang luas sebagai konsep yang bersifat inklusif yang tercermin dari kebijakan nasional setiap negara dan pemerintah tentang

kebijakan pendidikan. Pendidikan untuk semua harus mengambil tanggung jawab tentang kebutuhan golongan miskin dan tidak beruntung, termasuk, pekerja anak, anak-anak di daerah pedesaan yang terpencil, anak dari budaya-bahasa minoritas, anak/remaja di daerah konflik, remaja yang terinfeksi HIV dan AIDS, dan anak-anak yang memerlukan kebutuhan khusus akan pendidikan (termasuk penyandang cacat).

a. Inklusi Pendekatan Perkembangan dalam Pendidikan

Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar dari semua anak, remaja dan orang dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh, terpinggirkan dan terabaikan. Prinsip pendidikan inklusif di adopsi dari Konferensi Salamca tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (UNESCO, 1994) dan di ulang kembali pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar (2000).

Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat anak-anak berbakat (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak serta anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994).

Persoalan pokok dalam pendidikan inklusif adalah hak azasi manusi (HAM) dalam pendidikan yang dinyatakan dalam deklarasi universal tentang hak azasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*, 1948). Hal yang lebih khusus dan sangat penting adalah hak anak untuk tidak didiskriminasikan yang dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*, UN, 1989). Sebagai konsekuensi logis dari hak-hak anak ini adalah bahwa semua anak (*all children*) mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang ramah yang tidak diskriminatif dalam hal kecacatan (*disability*), kelompok etnik (*ethnicity*), agama (*religion*), bahasa (*language*), jenis kelamin (*gender*), kemampuan (*capability*) dan sebagainya.

Sementara itu terdapat alasan-alasan penting seperti alasan ekonomi, sosial, dan politik untuk mencari kebijakan dan pendekatan pendidikan yang berifat inklusif. Ini

berarti bahwa pendidikan harus memimbulkan perkembangan personal, membangun hubungan di antara individu, kelompok dan bangsa. *Salamanca Statement and framework for Action*, (1994) menjelaskan bahwa sekolah regular yang beorientasi inklusif adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat inklusif dan mencapai cita-cita pendidikan untuk semua.

Pengaruh perkembangan politik terhadap keberagaman budaya dan meluasnya pemahaman tentang demokrasi telah menguatkan peran pendidikan dalam sosialisai politik dan memfasilitasi keaktifan warga negara dalam berdemokrasi. Pendidikan, disamping harus merespon keberagaman talenta individual, pendidikan juga harus menghadapi rentang latar belakang budaya yang luas dari kelompok yang akan membentuk masyarakat (*society*). Pendidikan harus memikul tugas berat untuk mengarahkan keberagaman menjadi sebuah kontribusi konstruktif terhadap pemahaman bersama antara individu dengan kelompok. Sebuah kebijakan pendidikan harus mampu mempertemukan pluralisme dan memungkinkan setiap orang menemukan tempatnya di dalam masyarakat. Komisi International tentang Pendidikan untuk abad 21, mengingatkan kebijakan pendidikan harus secara memadai bersifat diversifikasi dan harus dirancang agar tidak menjadi penyebab terjadinya eklusi sosial, dan sekolah-sekolah harus mendorong keinginan individu untuk hidup secara bersama/ *to live together* (UNESCO, 1996).

Dari penjelasan itu terkandung makna adanya pengakuan terhadap konsep pendidikan dasar yang luas, yang meliputi: pemberian akses yang sangat luas dan mempromosikan kesamaan, memfokuskan kepada belajar, memperluas cara dan lingkup pendidikan, meningkatkan peran lingkungan untuk kepentingan belajar, dan memperkuat kemitraan (UNESCO, 1990).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sebagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua (*education for all*). Pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun konsep yang koheren dan kerangka kebijakan yang kontekstual dengan kondisi lingkungan sehingga tersedia akses dan kesamaan dalam pendidikan dasar untuk semua anak, dan apa yang terkandung dalam

pendidikan sehingga kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang beragam dapat direspon dan dipenuhi di dalam jalur utama pendidikan (pendidikan biasa), baik pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

b. Memahami Konsep Pendidikan Inklusif

Inklusi dipandang sebagai sebuah **proses** dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 1996). Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari system pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 1994).

Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam *setting* pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah system pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah.

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep pendidikan inklusif, diperlukan definisi yang jelas, disepakati dan diterima oleh banyak pihak secara internasional. Jika pendidikan inklusif didefinisikan secara sempit atau hanya didasarkan pada pandangan bahwa **anak sebagai masalah**, maka pendidikan inklusif akan menjadi tidak cocok. Definisi tentang pendidikan inklusif akan terus berubah secara pelan-pelan sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam prakteknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak azasi manusia.

Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, tetapi diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan

khusus/PLB (*special esucation*). Konsep yang mendasari pendidikan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus (*special education*). Inklusi atau pendidikan inklusif adalah bukan istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (*education for all*) dan konsep tentang perbaikan sekolah (*schools improvement*).

Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Agra India, yang disetujui oleh 55 partisipan dari 23 negara. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut:

- Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan system informal
- Menghargai bahwa semua anak dapat belajar
- Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak
- Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan
- Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya
- Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif. (*Seminar on Inclusive Education Agra India, 1998*).

Definisi yang dikutip di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, system pendidikan, keragaman dan disriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang sumber daya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Konsep tentang anak

- Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri
- Semua anak dapat belajar dan anak dapat mengalami kesulitan dalam belajar

- Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar
- Pembelajaran berpusat pada anak menguntungkan semua anak

2) Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah

- Pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah (*formal schooling*)
- Fleksibel, sistem pendidikan bersifat responsif
- Lingkungan pendidikan ramah terhadap anak
- Perbaikan mutu sekolah dan sekolah yang efektif
- Pendekatan yang menyeluruh dan kolaborasi dengan mitra kerja

3) Konsep tentang Keberagaman dan Diskriminasi

- Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan (*exclusion*)
- Memandang keragaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah
- Pendidikan inklusif menyiapkan siswa yang dapat menghargai perbedaan-perbedaan.

4) Konsep tentang Proses Memajukan Inklusi

- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam inklusi
- Meningkatkan partisipasi nyata dari semua pihak
- Kolaborasi dan kemitraan
- Metodologi partisipatori, penelitian tindakan dan kolaboratif inkuiri

5) Konsep tentang Sumberdaya

- Memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia (*local resources*)
- Mendistribusikan sumber daya yang tersedia
- Memandang manusia (anak, orang tua, guru, kelompok orang yang termarginalkan dsb) sebagai sumberdaya kunci
- Sumberdaya yang tepat di sekolah dan masyarakat dibutuhkan untuk anak-anak yang berbeda. Sebagai contoh Braille, alat-alat bantuan (*assistive device*)

c. Pendidikan Inkusif dalam Konteks yang Lebih Luas

Orang kebanyakan sering mengabaikan atau tidak dapat membedakan pengertian sekolah inklusif dengan pendidikan inklusif, antara konteks masyarakat inklusif dan perkembangan inklusif. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan mengenai konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1) Sekolah Inklusif (Inclusive Schooling)

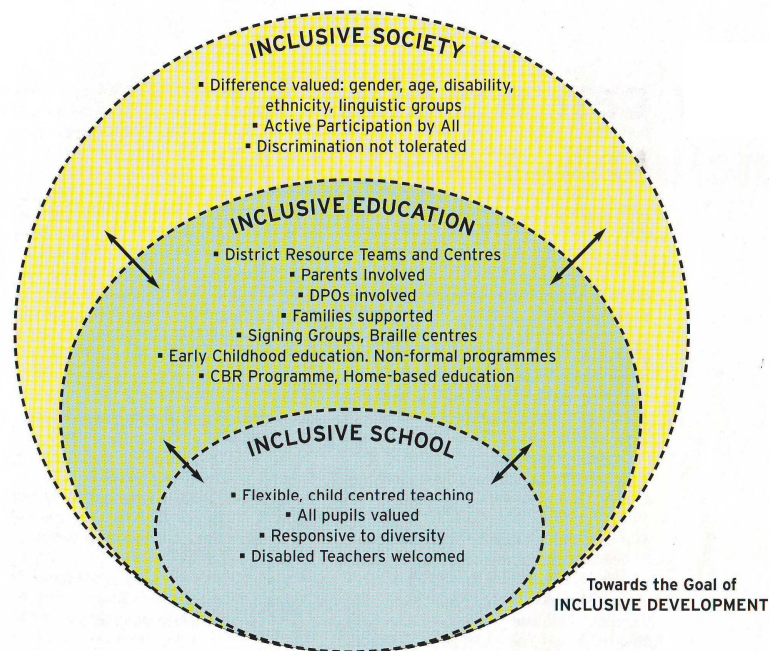
Sekolah inklusif adalah fokus kebijakan pendidikan di negara-negara utara sebagai sistem persekolahan yang sangat luas dan mantap bahwa semua anak menghabiskan sebagian besar waktu yang mereka miliki di sekolah. Dari perspektif negara-negara di utara pendidikan inklusif sama artinya dengan sekolah inkludif.

2) Pendidikan Inklusif (Inclusive Education)

Pendidikan inklusif mempunyai makna yang lebih luas dari pada sekolah inklusif. Kenyataan bahwa dua per tiga dari negara di dunia (negara-negara selatan) di dalam masyarakatnya tidak memiliki sekolah tetapi memiliki pendidikan dan pendidikan terjadi di tempat-tempat yang bervariasi dan merefleksikan pendekatan-pendekatan yang merentang sangat luas. Oleh karena itu pendidikan inklusif mencakup: pendidikan informal, pendidikan non-formal, pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat petani di ladang, pendidikan agama yang spesifik di Mesjid, di Candi, di Gereja dan semua bentuk pendidikan yang bersifat tradisional.

3) Masyarakat Inklusif (Inclusive Society)

Pendidikan inklusif adalah bagian dari strategi untuk memajukan masyarakat inklusif. Masyarakat inklusif memungkinkan semua anak dan orang dewasa apapun keadaan mereka : jenis kelamin, kemampuan, ketidakmampuan, dan etnik untuk berpartisipasi dan berkontribusi di dalam masyarakat.



4) Pengembangan Inklusif (Inclusive Development)

Pengertian pengembangan dalam konteks ini harus dilihat sebagai pertumbuhan menuju kematangan yang terkait dengan konsep-konsep seperti : mencapai hak azasi secara penuh, keberlangsungan sumberdaya dan penghargaan terhadap lingkungan, tanggung jawab social dan penghargaan pada keberagaman. Dalam konteks perkembangan inklusif (*inclusive development*) adalah mengenai :

- Menjamin bahwa semua orang mempunyai akses untuk mendapatkan hak-hak dasar. Hak-hak dasar dari kelompok yang rawan termasuk penyandang cacat adalah makanan, perlindungan, pakaian, dan cinta kasih.
- Mengakui bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak akan terjadi tanpa partisipasi dan inklusi semua anggota masyarakat. Hasil dari tindakan eksklusi yang diraskan saat ini adalah terjadinya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, peningkatan terjadinya konflik, dan tidak tumbuh toleransi.
- Menjadi inklusif sejak awal misalnya pendidikan secara inklusi dimuali sejak usia pra sekolah (semua anak terlibat dalam kelompok

e. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Konsep Inklusi

Munculnya gagasan tentang pendidikan inklusif dilatarbelakangi oleh dua factor utama yaitu adanya gerakan yang disebut *schools improvement* dan didorong oleh pemikiran yang berkembang dalam bidang *special needs education*. Kedua factor tersebut dalam realitasnya terjadi melalui: (1) Lobi-lobi yang dilakukan oleh para aktivis seperti organisasi penyandang cacat, kelompok-kelompok orang tua, dan kelompok-kelompok yang mendorong anak perempuan untuk memperoleh akses ke pendidikan, (2) Adanya pandangan yang menganggap bahwa program sekolah khusus dan sekolah terpadu tidak berhasil, (3) Adanya desakan yang sangat kuat terhadap sekolah agar peduli terhadap kenyataan bahwa ada sekian banyak anak yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses ke pendidikan, seperti pengungsi, orang yang terinfeksi HIV/AIDS, anak-anak dari keluarga miskin, dan situasi konflik, (4) Adanya keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pemberantasan buta huruf dan keberhasilan program rehabilitasi berbasis masyarakat (*Community Based Rehabilitation*), dalam membantu mengembangkan para penyandang cacat, (5) Banyaknya contoh-contoh keberhasilan dalam praktek inklusif dalam rentang budaya dan konteks social tertentu.

1) *Schools Improvement*

a) Gerakan *Schools Improvement* di Negara Selatan (Negara Berkembang)

Salah satu aspek dari gerakan *Schools improvement* atau perbaikan mutu sekolah adalah mempromosikan pendidikan dasar untuk **semua**, yaitu memberi kesempatan kepada semua anak untuk belajar pendidikan dasar di sekolah (meningkatkan akses). Akan tetapi jika hanya sekedar memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah adalah tindakan yang membuang-buang waktu, tenaga dan sumber daya saja kecuali apa yang terjadi di sekolah bermanfaat, relevan dengan masyarakat, efektif dan cocok dengan kebutuhan anak. Dengan kata lain pendidikan harus berkualitas

Jika pendidikan tidak bermakna bagi anak dan masyarakat (berkualitas), maka kemudian anak bisa jadi bakal keluar dari sekolah (*dropping out*), orang tua dan masyarakat tidak memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak mereka. Sangat banyak sekolah di Negara berkembang yang berkualitas rendah. Oleh karena itu yang dimaksud

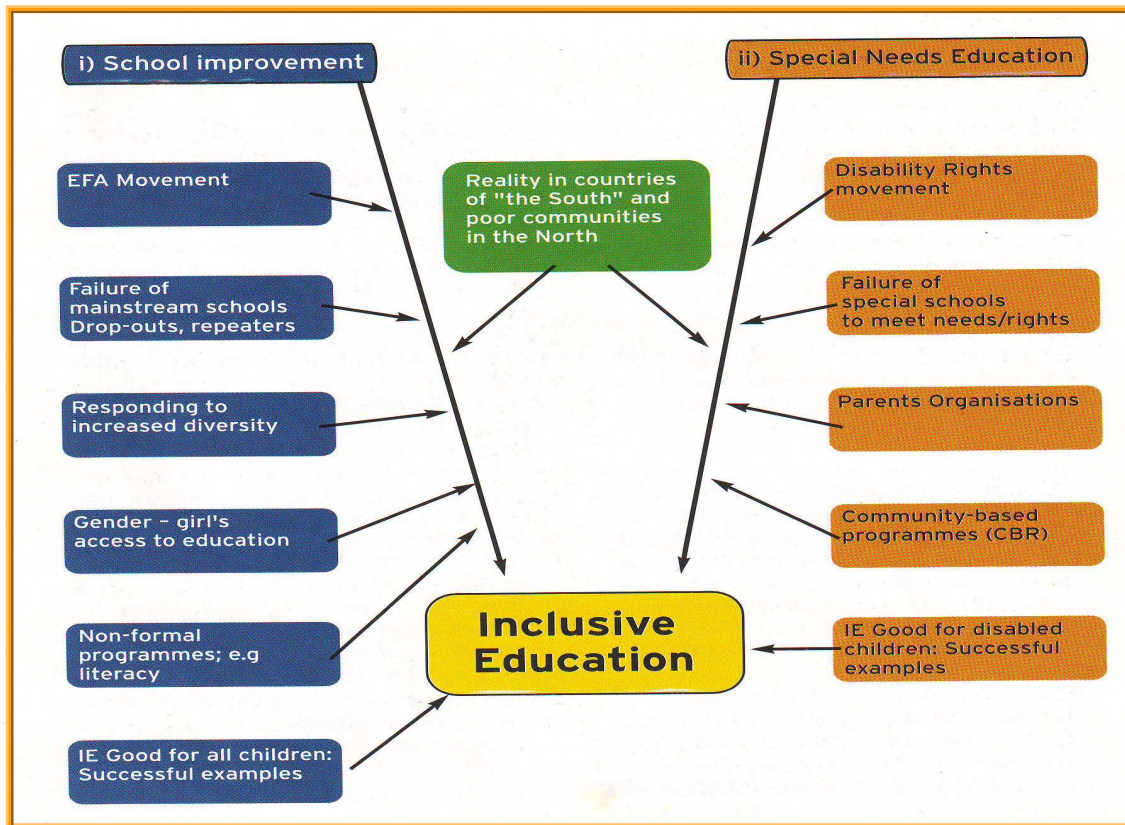
schools improvement adalah upaya untuk memperbaiki mutu sekolah untuk semua anak (*for all children*). Masalah-masalah yang mempengaruhi sekolah, berkaitan erat dengan kemiskinan dan diskriminasi yang berlangsung dalam jangka waktu lama yang antara lain meliputi: utang pemerintah, pengaruh penjajahan, pengaruh penyesuaian kebijakan struktural, dan konflik horizontal di dalam masyarakat.

Kenyataan seperti itu mendorong munculnya inisiatif sebagai respon untuk mencari jalan ke luar dari masalah-masalah seperti itu. Salah satu gerakan perbaikan mutu sekolah dilakukan oleh organisasi non pemerintah di Inggris yang disebut *Save the Children*, meluncurkan program yang diberi nama *Responsive School Systems* yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Bersifat inklusif, yang merespon terhadap kebutuhan semua anak di masyarakat, (2) Mengupayakan adanya sumber-sumber daya yang cocok dengan keperluan dan memadai, (3) Mengembangkan pendidikan berkualitas yang ditandai adanya relevansi antara pendidikan dengan kehidupan masyarakat dan memberikan respon terhadap perkembangan kebutuhan setiap anak. Contoh upaya yang dilakukan dalam rangka *schools improvement* yang sedang terjadi di Negara-negara selatan (Negara berkembang) dapat dilihat pada bagan 1.6 sebagai berikut:

Tabel 1.6
Upaya yang Dilakukan dalam Schools Improvemant

| Masalah-Masalah | Solusi-solusi |
|--|---|
| Pembelajaran yang buruk: terlalu ketat, mutu pelatihan guru yang buruk, tidak responsive terhadap kebutuhan anak | Memberikan dukungan kepada guru menjadi reflektif dan aktif: pelatihan guru ditempat kerja (di sekolah) |
| Anak pasif-tidak didorong belajar secara aktif, Jumlah murid sangat banyak dalam satu kelas. Banyak anak yang <i>dropout</i> | Mengembangkan jalinan yang kuat antara sekolah dan masyarakat, menggunakan metode partisipatori dalam pembelajaran. |
| Membaca permulaan dan keterampilan dasar tidak diajarkan dengan memadai | Memperkenalkan metodologi pembelajaran berpusat pada anak dan belajar aktif. Melibatkan anak dalam memecahkan masalah |
| Sekolah tidak relevan dengan kehidupan dalam masyarakat-tidak berhubungan dengan tantangan kehidupan | Menciptakan system yang fleksibel yang dapat beradaptasi terhadap perubahan dengan dukungan jaringan yang luas. Menyesuaikan system kepada anak bukan anak kepada |

| | |
|---|---|
| <p>Sistem yang kaku dan tidak tepat sebagai warisan penjajah dan tekanan dari Negara donor</p> <p>Tidak dapat merespon terhadap tekanan-tekanan yang mutakhir; konflik, situasi pengungsi, gap antara kaya-miskin</p> <p>Kekurangan fasilitas fisik; Gedung, alat-alat, dan sanitasi yang buruk</p> | <p>system.</p> <p>Belajar dari keberhasilan pendidikan non/in formal, merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan membuka kesempatan yang luas.</p> <p>Melibatkan masyarakat, LSM local dan pemerintah dalam pengadaan infrastuktur yang memadai.</p> |
|---|---|



Bagan 1.5 Latarbelakang Gagasan Pendidikan Inklusif

b) **Schools Improvement di Negara Utara (Negara Maju)**

Di negara-negara maju di belahan utara, sekolah juga berubah dan berkembang serta sering mengalami konflik dalam menghadapi tekanan-tekanan yang dapat menimbulkan pengucilan (ekslusi) pada siswa-siswanya, beban kurikulum yang berlebihan, guru yang tertekan dan siswa yang buruk prestasi belajarnya. Selain itu ada peningkatan tantangan berkenaan dengan keberagaman kebutuhan siswa yang luas, siswa yang berasal dari bahasa yang berbeda, dan etnik minoritas dan anak-anak pengungsi setra termasuk anak-anak penyandang cacat yang bervariasi.

Meskipun sekolah-sekolah di negara maju di belahan utara sering mengeluhkan juga tentang kekurangan sumber daya, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di negara miskin di belahan selatan, yang berarti kekurangan sumberdaya berkaitan dengan makanan, air bersih, perlindungan dan peralatan. Tetapi baik di negara maju di utara maupun di negara miskin di belahan selatan sesungguhnya memiliki masalah bersama berkenaan dengan **inklusi** dan **ekslusi**.

Dalam upaya *schools improvement*, di Negara maju terutama di Inggris, diperkenalkan sebuah projek yang disebut *Improving the quality of Education for All (IQEA)* sebagai reformasi terhadap kondisi di masa lalu. Proyek ini mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Mengembangkan visi sekolah kemitraan, (b) Melihat tekanan dari luar sebagai peluang, (c) Menciptakan kondisi agar semua anak belajar, (c) Mengembangkan perangkat untuk melakukan kemitraan dan pemberdayaan individu-individu dan kelompok (d) Evaluasi dan monitoring dijadikan tanggung jawab bersama.

c) **Implikasi dari *Schools Improvement* terhadap Pendidikan Inklusif**

Penjelasan di atas tentang masalah-malah pendidikan terutama pendidikan dasar yang dihadapi baik oleh Negara-negara di belah selatan (kelompok Negara berkembang) maupun negara-negara di belahan utara (kelompok Negara maju), dan solusi-solusi yang dilakukannya dapat menciptakan lingkungan dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan inklusif. Ini disebabkan bahwa dalam kenyataannya, sebuah sekolah tidak baik untuk **semua** anak, apalagi untuk anak penyandang cacat dan anak-anak yang termarginalkan.

Oleh sebab itu inklusi bukan sekedar memasukan anak penyandang cacat ke dalam system yang kaku seperti yang ada sekarang, dan bukan persoalan mengadaptasikan anak ke dalam system, akan tetapi persoalan mengadaptasikan system yang ada kepada semua anak. Dalam perspektif pendidikan inklusif yang dipandang sebagai masalah adalah system (kurikulum, guru, lingkungan) bukan anak. Oleh karena itu system yang harus disesuaikan dengan keragaman anak, yaitu perhatian guru harus berpusat pada anak, kurikulum harus menjadi fleksibel, masyarakat dan orang tua harus terlibat

2) Pengaruh Pendidikan Kebutuhan Khusus

a) Pendidikan Kebutuhan Khusus di Negara Maju

Istilah pendidikan butuhan khusus (*special needs education*) dan kebutuhan khusus akan pendidikan (*special educational needs*) sering digunakan tetapi kadang-kadang tidak begitu jelas. Di Negara-negara maju di belahan utara, istilah tersebut sudah digunakan sejak tahun 70-an. Laporan Warnock pada tahun 1978 menekankan bahwa 20% dari jumlah anak usia sekolah memiliki kebutuhan khusus sementara pada aspek tertentu selama mereka belajar di sekolah dan mereka itu berada di sekolah biasa.

Laporan Warnock juga menekankan pentingnya memahami anak yang mempunyai kebutuhan khusus akan pendidikan (*children with special educational needs*) ketimbang istilah anak penyandang cacat (Stubbs, 2002). Sesungguhnya hal ini merupakan gerakan yang positif, karena ini merupakan perubahan focus perhatian dari karakteristik fisik anak (*disability*) ke kebutuhan pendidikan yang mereka alami.

UNESCO pada awalnya menggunakan istilah kebutuhan khusus akan pendidikan (*special educational needs*) untuk menggambarkan anak-anak penyandang cacat, tetapi dalam pernyataan Salamna, istilah tersebut dikembalikan kepada pengertian seperti yang dimaksud pada laporan Warnock, yaitu bukan hanya menggambarkan penyandang cacat tetapi untuk menggambarkan semua anak yang memiliki kebutuhan yang diakibatkan oleh adanya hambatan dalam belajar.

Berkenaan dengan anak-anak penyandang cacat, istilah kebutuhan khusus (*special needs*) kadang-kadang membingungkan. Kebanyakan anak penyandang cacat lebih

memerlukan alat-alat bantu (*assistie divice*) dan lingkungan yang aksesibel atau bantuan tertentu dan peralatan untuk membantu mereka agar mempunyai akses kepada kurikulum sekolah biasa, tetapi mereka sesungguhnya tidak mempunyai hambatan yang nyata dalam belajar. Akan tetapi di lain pihak banyak anak yang bukan penyandang cacat tetapi mengalami hambatan dalam belajar. Oleh sebab itu disadari atau tidak semua orang pada situasi tertentu dan pada waktu tertentu bisa mengalami hambatan belajar dan memiliki (*special needs education*) dan kebutuhan khusus akan pendidikan (*special educational needs*) istilah yang cakupannya luas, termasuk didalamnya penyandang cacat (*children with disability*).

b) Pendidikan Kebutuhan Khusus di Negara Berkembang

Kebijakan dan paktek pendidikan bagi anak penyandang cacat di Negara-negara berkembang dibelahan selatan banyak diimpor dari Negara maju atau merupakan kehendak dari Negara-negara pemberi bantuan (utang), atau diperkenalkan oleh elit yang mempunyai ikatan dengan Negara maju tertentu dan meniru apa yang dilakukan secara paktis di negara maju.

Meskipun kebijakan dan praktek pendidkan anak penyandang cacat yang ditiru dari negra maju maksudnya baik, tetapi hasilnya bisa menjadi malapetaka karena : (1) mencabut anak penyandang cacat dari jalur sekolah biasa dan dari masyarakatnya, (2) Terjadi pelabelan melalui tes psikologi yang berasal dari negara maju yang tidak mempunyai nilai tranferabilitas kultural, (3) Sekolah khusus sering menjadi semacam tempat pembuangan anak yang tidak memiliki fasilitas yang cukup dan tidak memiliki guru yang terlatih dengan baik, (3) Menciptakan sekolah elit yang melayani sekelompok kecil anak (4) Merusak system pendukung lokal dan menggnantinya dengan system yang tidak tepat.

Kenyataan seperti dijelaskan di atas menjadi pendorong munculnya pemikiran dan kesadaran baru tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas yang dapat menjangkau semua anak dalam satu system pendidikan yang sama.

c) Pengaruh Gerakan Pendidikan Kebutuhan Khusus terhadap Inklusi

Harus diakui bahwa banyak pelopor dan pejuang inklusi atau pendidikan inklusif adalah pendukung pendidikan kebutuhan khusus yang tangguh. Secara perlahan-lahan mereka mulai menyadari bahwa pendidikan khusus memiliki keterbatasan. Akan tetapi banyak pelajaran yang baik yang dapat diambil dari praktek pendidikan kebutuhan khusus yang berkualitas, yaitu (1) Pembelajaran kreatif yang berpusat pada anak merespon gaya dan kebutuhan belajar secara individual, (2) Pendekatan holistic terhadap anak dengan memperhatikan semua area perkembangannya, (3) Hubungan yang erat antara keluarga dan sekolah, dan keterlibatan orang secara aktif terhadap pendidikan anaknya di sekolah, (3) Pengembangan teknologi yang spesifik memfasilitasi akses terhadap pendidikan dan membantu mengatasi hambatan belajar.

Nilai-nilai positif yang terkandung dalam pendidikan kebutuhan khusus bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan *schools improvement*. Selain itu keahlian khusus dalam pendidikan kebutuhan khusus memungkinkan anak penyandang cacat untuk memiliki akses terhadap kurikulum atau keahlian dalam mengembangkan keterampilan dasar belajar adalah sangat penting dalam mengembangkan pendidikan inklusif bagi semua.

Dalam konteks pendidikan inklusif peranan para profesional pendidikan kebutuhan khusus berubah menjadi nara sumber (*resources person*) yang memfokuskan tugasnya kepada upaya menghilangkan hambatan yang ada di dalam system, agar dapat diadaptasikan kebutuhan belajar semua anak dapat dipenuhi

C. Fungsi Pendidikan Kebutuhan Sebagai Disiplin Ilmu

Pendidikan kebutuhan khusus sebagai disiplin ilmu mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) Fungsi preventif, (2) Fungsi kompensasi, (3) Fungsi intervensi,

1. Fungsi Preventif

Fungsi preventif adalah upaya pencegahan agar tidak muncul hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu. Hambatan belajar pada anak dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu: (a) akibat faktor lingkungan. Seorang anak dapat mengalami hambatan belajar karena bisa disebabkan oleh kurikulum yang

terlalu padat, kesalahan guru dalam mengajar, anak yang terpaksa harus bekerja mencari nafkah, trauma karena bencana alam/perang, anak yang diperlakukan kasar di rumah dsb.

Fungsi preventif pendidikan kebutuhan khusus adalah mencegah agar faktor-faktor lingkungan tidak menyebabkan munculnya hambatan belajar, (b) akibat faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Misalnya seorang anak yang kehilangan fungsi penglihatan atau kehilangan fungsi pendengaran yang dibawa sejak lahir, kondisi seperti itu dipandang sebagai hambatan belajar yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Fungsi preventif pendidikan kebutuhan khusus dalam hubungannya dengan kondisi seperti ini adalah mencegah agar kehilangan fungsi penglihatan atau pendengaran itu tidak berdampak buruk dan lebih luas kepada aspek-aspek perkembangan dan kepribadian anak, (c) interaksi antara faktor lingkungan dan faktor dari dalam diri anak. Misalnya seorang anak yang kehilangan fungsi pendengaran dan secara bersamaan anak ini hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak memberikan kasih sayang yang cukup, sehingga anak ini mengalami hambatan belajar yang disebabkan oleh faktor dirinya sendiri (kehilangan fungsi pendengaran) dan akibat faktor eksternal lingkungan.

Fungsi preventif pendidikan kebutuhan khusus dalam konteks seperti ini adalah melokalisir dampak dari kehilangan fungsi pendengaran dan secara bersamaan menciptakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang yang tidak diperoleh di lingkungan keluarganya.

2. Fungsi Intervensi

Kata intervensi dapat diartikan sebagai upaya menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang sudah terjadi pada diri anak. Misalnya seorang anak mengalami gangguan dalam perkembangan kecerdasan/kognitif sehingga ia mengalami kesulitan dalam belajar secara akademik. Fungsi intervensi pendidikan kebutuhan khusus adalah upaya menangani anak agar dapat mencapai perkembangan optimum sejalan dengan potensi yang dimilikinya.

Contoh lain, seorang anak yang mengalami gangguan dalam perkembangan motorik (misalnya: *cerebral palsy*). Akibat dari gangguan motorik ini anak dapat mengalami kesulitan dalam bergerak dan mobilitas, sehingga akitivitasnya sangat terbatas. Fungsi intervensi pendidikan kebutuhan khusus dalam konteks ini adalah

menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak dapat belajar secara efektif, sehingga dapat mencapai perkembangan optimum sejalan dengan potensi yang dimilikinya.

Dengan kata lain fungsi intervensi tidak dimaksudkan supaya anak yang mengalami kehilangan fungsi pendengaran agar dapat mendengar, tetapi dalam keadaan tidak dapat mendengar mereka tetap dapat belajar, bekerja dan hidup secara wajar bersama dengan orang lain dalam lingkungannya. Inilah yang disebut dengan *coping*, artinya anak dapat berkembang optimum dengan kondisi yang dimilikinya.

3. Fungsi Kompensasi

Pengertian kompensasi dalam konteks pendidikan kebutuhan khusus diartikan sebagai upaya pendidikan untuk menggantikan fungsi yang hilang atau mengalami hambatan dengan fungsi yang lain. Seorang anak yang kehilangan fungsi penglihatan akan sangat kesulitan untuk belajar atau bekerja jika berhubungan dengan penggunaan fungsi penglihatan. Oleh karena itu kehilangan fungsi penglihatan dapat dialihkan/dikompensasikan kepada fungsi lain misalnya perabaan dan pendengaran. Salah satu bentuk kompensasi pada orang yang kehilangan penglihatan adalah penggunaan tulisan braille. Seorang tunanetra akan dapat membaca dan menulis dengan menggunakan fungsi perabaan.

Seorang yang kehilangan fungsi pendengaran akan mengalami kesulitan dalam perkembangan keterampilan berbahasa, dan oleh sebab itu akan terjadi hambatan dalam interaksi dan komunikasi. Bentuk kompensasi dari adanya hambatan dalam interaksi dan komunikasi pada orang yang kehilangan fungsi pendengaran adalah penggunaan bahasa isyarat. Dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat fungsi penglihatan sangat berperan sebagai kompensasi dari fungsi pendengaran

Contoh lain jika di sekolah ada seorang anak yang mengalami hambatan dalam penggunaan fungsi motorik, ia akan sangat mengalami kesulitan dalam hal menulis. Ketika misalnya anak tersebut akan mengikuti ujian maka dapat dilakukan tindakan kompensasi dengan tidak mengikuti ujian secara tertulis melainkan dengan ujian lisan. Dalam hal aktivitas belajar, anak itu tidak dituntut untuk mencatat apa yang mereka

pelajari tetapi dapat menggunakan cara lain misalnya menggunakan tape recorder atau apa yang akan dijelaskan oleh guru diberikan dalam bentuk teks.

Melalui upaya kompensasi, anak akan tetap dapat mengikuti aktivitas belajar seperti yang dilakukan oleh anak lainya dengan cara-cara yang dimodifikasi dan diseuaikan dengan mengganti fungsi yang hilang/ tidak berkembang dengan fungsi lainnya yang masih utuh.

D. Rangkuman

Fokus perhatian pendidikan khusus lebih diarahkan kepada label kecacatan, dan layanan pendidikan didasarkan pada kategori kecacatan. Konsekuesni dari konsep pendidikan khusus melahirkan bentuk layanan pendidikan bagi anak-anak penyandang cacat bersifat segregasi dan integrasi.

Sementara itu istilah pendidikan kebutuhan khusus bukan istilah baru sebagai pengganti istilah pendidikan khusus, tetapi merupakan perluasan konsep pendidikan khusus. Fokus perhatian pendidikan kebutuhan khusus diarahkan pada perberbedaan individu dalam perkembangan dan hambatan belajar. Anak-anak yang memiliki hamabatan belajar dan hambatan perkembangan (termasuk anak-anak penyandang cacat) dipandang sebagai anak yang memerlukan layanan khusus dalam pendidikan (*children with speciaional educational needs*). Oleh karena itu layanan pendidikan anak anak seperti itu tidak harus selalau di sekolah khusus, tetapi dapat dilayani di sekolah biasa sepanjang hambatan belajarnya dan kebutuhannya dapat dilayani.

E. Umpan Balik.

Untuk mengetetahui sejauh mana pembaca dapat memahami penjelasan yang terkandung pada bab I, anda dapat menjawab dan mendiskusikan beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Apa yang menjadi landasan berpikir konsep pendidikan khusus dan pendidikan kebutuhan khusus, sehingga dapat dilihat perbedaan dari kedua konsep tersebut

2. Jelaskan alasan-alasan yang mendasari bahwa semua anak (termasuk anak-anak penyandang cacat) lebih baik dilayani dalam satu sistem pendidikan yang sama (sekolah biasa) daripada di sekolah khusus?
3. Menurut yang anda pahami, mengapa pendidikan inklusif itu dipandang lebih maju dibandingkan dengan pendidikan segregasi dan pendidikan integrasi?

Sumber Bacaan

- Alimin, Zaenal (2004) *Reorientasi Pemahaman Konsep Pendidikan Khusus Ke Pendidikan Kebutuhan Khusus dan Implikasinya terhadap Layanan Pendidikan*. Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus. Vol.3 No 1 (52-63)
- Johsen, Berit and Skjorten D. Miriam, (2001) *Education, Special Needs Education an Intoduction*. Unifub Porlag: Oslo
- Foreman, Phil (2002), *Integration and Inclusion In Action*. Mc Person Printing Group: Australia.
- Lewis, Vicky (2003), *Development and Disability*. Blckwell Publishing Company: Padstow, Cornwall.
- Stubbs, Sue (2002) *Inclusive Education: Where there are few resources*. The Atlas Alliance: Gronland , Oslo.